




KATALOG PROGRAM

PAPUA & PAPUA BARAT



- 
- 1 | Sistem Informasi Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat
 - 3 | Sinergi Perencanaan di Provinsi Papua dan Papua Barat
 - 5 | Dukungan Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS di Papua Barat
 - 7 | Dukungan Komunikasi Program Afiriasi Perlindungan Sosial Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua dan Papua Barat
 - 9 | Distrik Membangun - Membangun Distrik di Provinsi Papua
 - 11 | Dukungan Penguatan untuk Pencatatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH). Mendekatkan Layanan Adminduk ke Tingkat Kampung Melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Provinsi Papua dan Papua Barat
 - 13 | Pemberdayaan Masyarakat Kampung & Kader Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat
 - 15 | Pemberdayaan Masyarakat Kampung & Kader Kampung untuk Program Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat



Disclaimer: Foto-foto di katalog ini yang menampilkan orang dan masyarakat yang tidak menggunakan masker dan jaga jarak, diambil sebelum pandemi COVID-19.

Sistem Informasi Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat

Sistem informasi Kampung menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpilah untuk membantu pemerintah kampung, distrik, dan kabupaten melakukan perencanaan sehingga program pembangunan dapat tepat sasaran.



Pada 2017, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan dukungan Program KOMPAK-LANDASAN menginisiasi penguatan sistem informasi kampung dengan memperkenalkan Sistem Administrasi Informasi Kampung (SAIK) yang dirancang sesuai konteks Tanah Papua. SAIK adalah sebuah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap rumah tangga yang ada di kampung. SAIK dapat digunakan secara *online* maupun *offline*.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat meningkatkan kemampuan SAIK. Di Papua, hasil pengembangan SAIK ini dikenal dengan nama SIO Papua atau Sistem Informasi Orang Papua. Sedangkan di Papua Barat, dikenal dengan nama SAIKPlus (SAIK+). Sampai awal 2022, sebanyak empat kabupaten di Papua, yaitu Jayapura, Nabire, Boven Digoel, dan Asmat telah menggunakan SIO Papua. Sementara di Papua Barat, SAIK+ yang awalnya dioperasikan di empat kabupaten (Manokwari Selatan, Sorong, Kaimana, Fakfak), kini telah direplikasi ke seluruh wilayah Papua Barat melalui Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS).

SIO Papua maupun SAIK+ menyediakan data serta informasi terkini dan valid tentang administrasi kependudukan, kondisi sosial dan ekonomi warga, serta potensi kampung. Data tersedia berdasarkan nama dan alamat (*by name, by address*) yang spesifik mencakup data pilah Orang Asli Papua (OAP) dan non-Papua (non-OAP) serta data pilah berdasarkan jenis kelamin dan ragam disabilitas.

SIO Papua dan SAIK+ menjadi asupan informasi bagi kampung dalam perencanaan, penganggaran dan fasilitasi layanan adminduk bagi warga kampung. Selanjutnya data SIO Papua dan SAIK+ juga dimanfaatkan oleh distrik untuk *monitoring* perkembangan kampung di wilayahnya dan melakukan pembinaan kepada kampung. Pemerintah kabupaten juga memanfaatkannya untuk perencanaan program dan melakukan layanan adminduk berdasar data yang diserahkan oleh kampung.

KOMPONEN KEGIATAN



APBD (provinsi dan kabupaten) serta **APB Kampung**



Sistem data dan informasi (data kependudukan, ekonomi penduduk dan potensi kampung)



Sumber daya manusia (kepala kampung, kader, fasilitator, dan aparat distrik)



Metode pendataan



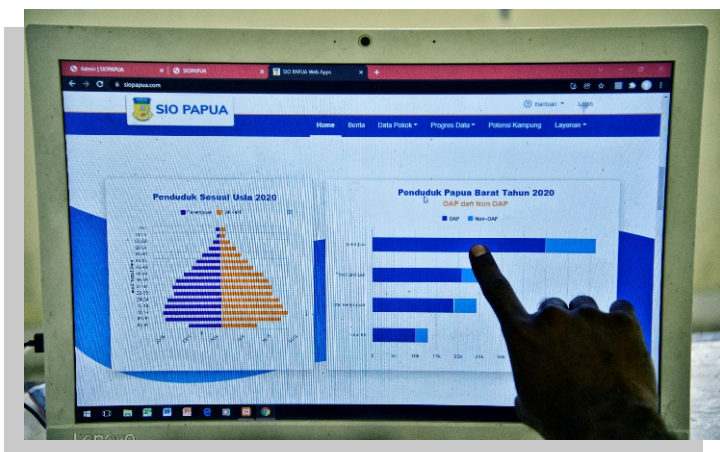
Teknologi aplikasi yang fleksibel, mudah digunakan dan diakses secara *online* dan *offline*



Pemanfaatan data untuk perencanaan kampung

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN SIO PAPUA DAN SAIK+

- 1 **Menyelenggarakan pelatihan** bagi kader kampung tentang fungsi dan peran kader serta bagaimana kader mengoperasikan sistem informasi kampung
- 2 **Melakukan pendataan keluarga** oleh kader
- 3 **Melakukan verifikasi dan validasi data** oleh kepala kampung atau sekretaris kampung bersama kader
- 4 **Menginput data ke sistem** oleh kader kampung
- 5 **Memastikan data dapat diakses** melalui aplikasi secara *online* maupun *offline*
- 6 **Memanfaatkan data** untuk perencanaan pembangunan kampung



DAMPAK KEGIATAN



Sebanyak 146 kampung (57 di Papua dan 89 di Papua Barat) sudah menggunakan sistem informasi kampung.



Sebanyak 724 orang (551 laki-laki dan 173 perempuan) telah mengikuti pelatihan SIO Papua dan SAIK+.



Kampung memiliki data *by name by address* (terpilah berdasarkan OAP dan non-OAP, jenis kelamin, dan ragam disabilitas) serta perencanaan kampung lebih efektif dan efisien dalam menentukan prioritas pembangunan kampung.



Pelayanan administrasi surat menyurat kampung kepada warga lebih efisien.



Memudahkan masyarakat mendapat layanan adminduk untuk kepemilikan KTP, KK, akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

“Data itu sangat membantu kita, aparat kampung. Kemarin waktu kita mau menyalurkan bantuan COVID-19, kita pakai itu data SAIK+. Kita bisa tahu betul berapa jumlah warga di kampung ini dan bagaimana kondisi mereka,” **Muhammad Ali Rumoning-Sekretaris Kampung Tanama, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.**

“SIO Papua ini, instrumen kampung tapi juga alat manajemen kampung, sehingga kepala kampung dan aparaturnya lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan data SIO Papua, kampung telah melakukan sinergi dengan sekolah dan puskesmas. Saya selaku kepala distrik sangat terbantu dalam memastikan dan mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat melalui data SIO Papua yang digunakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang sinergis dengan kerjasama antar kampung dan petugas puskesmas dapat mengatasi hal ini secara baik,” **Dominikus Anggawen-Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua.**

Tertarik menginisiasi Sistem Layanan Kampung di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

DR. Andry Damir, S.IP., M.Si.

Direktur Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang), Bappeda Provinsi Papua

☎ 0812- 4803-739

Legius Wanimbo

Kepala Bidang Perencanaan Otsus, Bappeda Provinsi Papua Barat

☎ 0823-9785-5138

Sinergi Perencanaan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Sinergi dalam proses perencanaan adalah langkah awal yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang lebih terpadu dan inklusif.



Sinergi perencanaan adalah model pendekatan untuk perencanaan pembangunan kampung terutama dalam mengatasi tantangan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan melalui sinergi antara kampung dan unit layanan seperti sekolah dan puskesmas. Model ini menggunakan data dari SIO Papua dan SAIK+ sebagai basis data yang akurat untuk perencanaan pembangunan kampung.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan dukungan Program KOMPAK – LANDASAN mengimplementasikan Sinergi Perencanaan. Model ini membantu pemerintah kampung untuk membangun kesepahaman atas masalah yang perlu diatasi serta solusinya melalui perencanaan, memberi ruang kepada masyarakat dan pemerintah kampung untuk menjadi subjek sekaligus penerima manfaat dari rencana kegiatan, serta membangun komitmen pemerintah kampung dan unit layanan untuk menyusun perencanaan program dan alokasi anggaran yang sesuai dengan persoalan dan usulan kebutuhan masyarakat.

KOMPONEN KEGIATAN



Peraturan: Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Kabupaten Boven Digoel



Lokakarya perencanaan kampung dan unit layanan



Anggaran: APBD provinsi dan kabupaten, APB Kampung, RKA Distrik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Pendampingan penyelesaian Dokumen Rencana Kampung dan unit layanan



Pelatihan fasilitator pertemuan untuk sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan



Pelatihan *monitoring* dan evaluasi kegiatan sinergi kampung dan unit layanan



Sosialisasi untuk distrik, kampung dan unit layanan



Pendampingan praktik *monitoring* dan evaluasi oleh distrik untuk kegiatan sinergi kampung dan unit layanan

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

- 1 **Pengembangan konsep model**
- 2 **Konsultasi dengan stakeholder** terkait di masing-masing kabupaten
- 3 **Perbaikan konsep** mekanisme implementasi
- 4 **Pelatihan untuk pelatih** di tingkat kabupaten
- 5 **Uji coba** pelaksanaan model
- 6 **Penyusunan modul/panduan pelaksanaan**
- 7 **Lokakarya perencanaan** untuk pemerintah dan unit layanan kampung
- 8 **Penyelesaian dokumen rencana kampung dan unit layanan**
- 9 **Pelatihan monitoring dan evaluasi** implementasi Sinergi Perencanaan untuk pemerintah distrik
- 10 **Implementasi kegiatan di kampung & unit layanan** (dilaksanakan masing-masing secara mandiri tanpa fasilitasi program)
- 11 **Pelaksanaan monitoring** periodik oleh pemerintah distrik
- 12 **Pelaksanaan evaluasi akhir** periode oleh pemerintah distrik

DAMPAK KEGIATAN



Sebanyak 68 kampung (13 di Papua dan 55 di Papua Barat) telah menerapkan Sinergi Perencanaan. Hasilnya:



Berkurangnya kasus gizi buruk dan stunting di Kampung Sokanggo, Ampera, Purwasak, Purwahab Tonggoh, dan Waharia, Kabupaten Nabire.



Meningkatnya keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kampung Ampera, Kabupaten Boven Digoel dari 30% pada tahun 2020 menjadi 60% pada tahun 2021.



Menurunnya kasus diare dari 5 kasus menjadi 0 dan kasus penyakit kulit dari 15 kasus menjadi 2 di Kampung Ampera Kabupaten Boven Digoel, pada tahun 2021.



Menurunnya kasus Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire.



Meningkatnya cakupan imunisasi di Kampung Ampera dan Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel.



Tidak ada lagi warga Kampung Moor, Kabupaten Nabire **yang buang air besar sembarangan.**



Menurunnya kasus anak-anak sekolah yang tidak bisa baca, tulis dan berhitung (calistung) di Kampung Tanama dan Purwasak, Kabupaten Fakfak.



Meningkatnya nilai capaian hasil belajar siswa pada Kampung Sokanggo, Ampera, di Kabupaten Boven Digoel dan di kampung Moor, Kabupaten Nabire, Kiat, serta Purwahab Tonggoh di Kabupaten Fakfak.



Komunikasi unit layanan dengan pemerintah kampung yang dilayani menjadi lebih baik.



Kampung-kampung memiliki pengalaman menyusun rencana pembangunan sendiri berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat kampung.



Distrik memiliki pengalaman mempraktikkan secara nyata koordinasi pembangunan di wilayahnya melalui praktik *monitoring* dan evaluasi kegiatan-kegiatan sinergi kampung dan unit layanan, yang dapat dilakukan kembali secara periodik.

“Selama ini kampung belum pernah membuat perencanaannya sendiri, namun melalui kegiatan Sinergi Perencanaan, kampung akhirnya bisa membuat perencanaan mereka bersama puskesmas dan sekolah. Ini hal baru bagi mereka dan akan saya dorong untuk terus berlanjut di wilayah ini,” **Jani Arbakala-Kepala Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.**

Tertarik menginisiasi Sinergi Perencanaan di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Suwarto, S.IP.

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua

☎ 0813-4482-5210

Jantje Tupalessy, S.Sos., M.Si.

Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

☎ 0813-4316-0300

Dukungan Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS di Papua Barat

PROSPPEK OTSUS Papua Barat merupakan contoh inisiatif program yang selaras dan mendukung kebijakan dan program nasional dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pembangunan kampung di seluruh Provinsi Papua Barat.



Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung Otonomi Khusus (PROSPPEK OTSUS) adalah program Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa bantuan keuangan kepada distrik, kelurahan, dan kampung untuk meningkatkan pembangunan kampung dan kelurahan. PROSPPEK-OTSUS bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

KOMPAK melalui Program LANDASAN mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasi PROSPPEK-OTSUS, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, mengidentifikasi dan melaksanakan penyaluran program bantuan agar tepat sasaran, mendukung pengurusan administrasi dan penerbitan dokumen kependudukan (akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) agar lebih efisien, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pendataan, penyimpanan data dan pengolahan data.

KOMPONEN KEGIATAN



Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK)



Anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) di provinsi dan kabupaten



Data dan informasi dasar kampung/ kelurahan dan distrik



Kader Pendamping



Pendampingan, bimbingan dan pengawasan

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

TINGKAT PROVINSI

- 1 Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor No. 15 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) serta mensosialisasikan peraturan gubernur dan pedoman pelaksanaan PROSPPEK OTSUS ke kabupaten
- 2 Menetapkan anggaran** pelaksanaan PROSPPEK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2020
- 3 Menetapkan SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kampung** di tingkat provinsi
- 4 Menyusun dan menetapkan pelaksanaan PROSPPEK** dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD
- 5 Menandatangani dan mengirim Surat Edaran Gubernur** tentang pelaksanaan PROSPPEK-OTSUS TA 2020 untuk kabupaten dan kampung
- 6 Memastikan pendanaan PROSPPEK** baik belanja langsung maupun bantuan keuangan masuk dalam APBD murni TA 2020

TINGKAT KABUPATEN, DISTRIK DAN KELURAHAN/KAMPUNG

- 1 Menetapkan anggaran pelaksanaan PROSPPEK** dalam RKPD dan KUA-PPAS TA 2020
- 2 Menetapkan SK Tim Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Kampung di tingkat kabupaten** (termasuk menentukan Ketua dan Sekretariat Bersama apakah di Bappeda atau DPMK)
- 3 Menyusun dan menetapkan pelaksanaan PROSPPEK** dalam RKA OPD
- 4 Menetapkan organisasi pelaksana PROSPPEK di tingkat distrik**, dengan struktur organisasi yang melekat pada tugas dan fungsi aparat distrik
- 5 Menetapkan organisasi pelaksana PROSPPEK di tingkat kelurahan/kampung**, dengan struktur organisasi yang melekat pada tugas dan fungsi aparat kelurahan

DAMPAK KEGIATAN



Sebanyak **53 kampung** telah menggunakan data SAIK+ dalam penyusunan perencanaan kampung



Sebanyak **38 kampung** melakukan verifikasi data kemiskinan menggunakan data SAIK+



Sebanyak **54 kampung** telah menggunakan data SAIK+ untuk mendukung penjangkauan adminduk bagi masyarakat kampung



Kabupaten/kota mulai menyadari pentingnya penyediaan data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

“Kemarin waktu kita mau menyalurkan bantuan COVID-19, kita pakai itu data SAIK+. Dengan data SAIK+ ini kita dapat mengetahui betul jumlah warga di kampung ini dan bagaimana kondisi mereka,” - Muhammad Ali Rumoning, Sekretaris Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua.

“Kegiatan pendampingan komunikasi PROSPPEK sangat berguna bagi kami karena memberi peningkatan kemampuan komunikasi. Ini bisa kami pakai dalam pekerjaan sehari-hari,” - Tomako Samaran, Kepala Bagian Humas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Tertarik menginisiasi Dukungan Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Awal Woretma, S.Pt., M.Si.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
☎ 0813-4470-0660

Adiri Jan Mandowen

Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
☎ 0813-4472-7451

Dukungan Komunikasi Program Afirmasi Perlindungan Sosial Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua & Papua Barat

Dukungan komunikasi yang sistematis, strategis, terarah serta menjangkau semua komponen masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang kualitas kesehatan dan kesejahteraan hidup anak dan lansia serta akses berbagai layanan publik.



KOMPAK mendukung aspek komunikasi dan sosialisasi dari implementasi Program Afirmasi Perlindungan Sosial Orang Asli Papua (OAP). Dukungan komunikasi diberikan mengingat besarnya kesenjangan antara ketersediaan program perlindungan sosial dengan kesiapan OAP dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

Bentuk dukungan aspek komunikasi yang diberikan adalah dengan menyiapkan anggota sekretariat bersama (sekber) yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten agar memiliki wawasan dan kemampuan mensosialisasikan Program Afirmasi Perlindungan Sosial bagi OAP di Papua Barat dan BANGGA Papua di Papua. Inisiatif program perlindungan sosial ini fokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak OAP usia di bawah 4 tahun.

Program Afirmasi Perlindungan Sosial Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat, merupakan replikasi dari Program BANGGA Papua di Provinsi Papua. Program ini telah diluncurkan bersamaan dengan PROSPPEK pada November 2019, tetapi belum diimplementasikan di lapangan. KOMPAK membantu pemerintah provinsi dalam merancang program yang disempurnakan berdasarkan pengalaman BANGGA Papua di Provinsi Papua. Bentuk pendataan program ini dirancang menggunakan SAIK+.

KOMPONEN KEGIATAN BANGGA PAPUA



Peraturan

- SK Gubernur No. 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera
- SK Gubernur No. 188.4/342/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Bersama Program Perlindungan Sosial BANGGA Papua
- SK Bupati terkait pembentukan Sekber Kabupaten (3 kabupaten ujicoba yaitu: Asmat, Paniai dan Lanny Jaya)



Anggaran

Model penganggaran yang dilakukan adalah *cost sharing* antara pemerintah daerah (baik provinsi dan kabupaten) dengan KOMPAK. Anggaran pemerintah daerah diambil dari Dana Otsus. Dalam *cost sharing* ini, KOMPAK dan MAHKOTA menanggung pembiayaan terkait pendampingan narasumber dan fasilitator, sedang pemerintah daerah menanggung biaya terkait peserta dan tempat kegiatan dilaksanakan



Asesmen dan analisis situasi kesiapan daerah, tata kelola, penganggaran dan komunikasi



Penyusunan dan pendampingan desain, regulasi dan RKA pemda (provinsi & kabupaten)



Penyusunan dan pendampingan dokumen petunjuk teknis operasional dan strategi komunikasi (strakom). Dalam program di Papua Barat, tim komunikasi telah memproduksi strakom untuk program yang di desain



Pelatihan tata kelola, monev dan komunikasi



Pendampingan dan pembuatan produk/media, dan panduan teknis komunikasi



Pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam program perlindungan sosial bagi OAP yang sesuai dengan konteks lokal



Pembuatan dan distribusi materi komunikasi



Monitoring dan evaluasi di kabupaten uji coba

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

- 1 **Melakukan asesmen dan analisis situasi komunikasi** terkait pemanfaatan Dana Otsus, pengetahuan situasi sosial dan lingkungan serta pengetahuan tentang kesehatan anak dan perlindungan sosial
- 2 **Menyusun dokumen strategi komunikasi**
- 3 **Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan** untuk sekretariat bersama (sekber) dan mitra sekber di provinsi dan kabupaten
- 4 **Membuat website BANGGA Papua**, sebagai bagian dari website Provinsi Papua (<https://info.bangga.papua.go.id>)
- 5 **Membentuk tim editorial** dari anggota sekber kabupaten dan provinsi, untuk keperluan update berita dari kabupaten
- 6 **Menyusun panduan teknis komunikasi**
- 7 **Monitoring dan evaluasi** komunikasi di kabupaten uji coba



DAMPAK KEGIATAN



Masyarakat mengetahui adanya pemanfaatan Dana Otsus untuk perlindungan sosial Orang Asli Papua (OAP).



Calon penerima manfaat di tiga kabupaten uji coba (Lanny Jaya, Asmat dan Paniai), mendaftarkan diri menjadi peserta program.



Terjadi peningkatan pencatatan data kependudukan yang sangat menonjol di kabupaten uji coba.



Terjadi peningkatan pengetahuan tentang pentingnya memperhatikan kualitas makanan dan kesehatan anak serta pencegahan stunting.



Sejumlah 23.425 mama (perempuan) penerima manfaat mempunyai akun/rekening bank.



Sejumlah 31,917 anak usia 0-4 tahun menjadi penerima manfaat.



Ada beragam produk material komunikasi yang memuat konteks lokal dan disampaikan lewat bahasa lokal (contoh video animasi BANGGA Papua dengan Bahasa Lanny).

“Pelatihan komunikasi persuasif, sangat bermanfaat bagi saya dalam menjalankan tugas sebagai Asisten I Kabupaten Manokwari Selatan, maupun sebagai Ketua Sekber PROSPPEK Kabupaten,” Jan Mandowen - Asisten 1, Kabupaten Manokwari Selatan, Ketua Sekber PROSPPEK, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

“Sa senang sekali, sekarang sa pu mama-mama su punya KTP dan nomor tabungan. Dengan KTP ini sekarang mereka bisa beli tiket pesawat, untuk pergi lihat mereka pu anak-anak yang merantau,” Emmy Songgonauw - Kader posyandu dan relawan BANGGA Papua, Kabupaten Paniai, Papua.

Dukungan Komunikasi Program Afirmasi Perlindungan Sosial Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua dan Papua Barat di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

DR. Andry Damir

Direktur PUSDALISBANG,
BAPPEDA Provinsi Papua

☎ 0812-4803-739

Legius Wanimo

Kepala Bidang Perencanaan Otsus,
BAPPEDA Provinsi Papua Barat

☎ 0823-9785-5138

Distrik Membangun - Membangun Distrik di Provinsi Papua

DMMD adalah model penguatan distrik kontekstual Papua untuk mendukung perannya sebagai ujung tombak birokrasi dan yang terdepan dalam melakukan pembinaan pengawasan kampung dan kampung adat, memfasilitasi layanan dasar, serta mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam ekonomi kerakyatan.



Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) merupakan salah satu program pembangunan Kabupaten Jayapura untuk memperkuat tata kelola distrik sebagai pusat pembangunan. DMMD mendorong meningkatnya kesejahteraan warga dengan menjadikan distrik sebagai pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat pelayanan dasar, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pusat sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pusat data dan informasi serta pengetahuan.

DMMD berupaya mengatasi tantangan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan tertentu, pengurusan administrasi kependudukan, dan layanan dasar tertentu yang semula di ibu kota kabupaten sekarang disediakan di distrik. Melalui kegiatan ini, KOMPAK mendukung Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan memberikan masukan teknis kebijakan, menyusun konsep DMMD, dan mengujicobakan di 10 distrik percontohan. Melalui DMMD, distrik diperkuat agar memiliki kewenangan dan kapasitas untuk melakukan pembinaan pengawasan kampung dan fasilitasi sinergi layanan baik dari unit-unit layanan di wilayah distrik, seperti puskesmas dan sekolah.

Di Kabupaten Jayapura, pembinaan dan pengawasan kampung juga difokuskan untuk mendorong pendataan kampung melalui SIO Papua yang telah diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi (SIM-FOI) di Kabupaten Jayapura. SIO Papua dan SIM FOI digunakan oleh distrik dan kampung untuk memetakan situasi saat ini, inventarisasi sumber daya, serta menentukan tujuan jangka menengah dan tahapan pencapaian.

KOMPONEN KEGIATAN



Asistensi Penyusunan kebijakan

Perbup 68/2020 tentang Distrik Membangun, draft Perda Distrik Membangun, Perbup 20/2021 tentang SOTK Distrik, draf Perbup Satu Data Indonesia Kabupaten Jayapura dan draft Perbup SIO Papua



APBD Kabupaten



Fasilitator lokal dan nasional



Penguatan kapasitas sumber daya manusia



Media belajar pengenalan DMMD



Pendampingan pelaksanaan

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

- 1 **Membangun kesepahaman tentang konsep DMMD** melalui sosialisasi, *focus group discussion (FGD)* dan penyamaan persepsi
- 2 **Membangun komitmen pemerintah distrik** untuk melaksanakan Program DMMD
- 3 **Mengintegrasikan DMMD dalam RPJMD**
- 4 **Menyusun payung hukum** melalui perbup dan perda serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
- 5 **Pendampingan penyusunan modul dan instrumen** penyusunan masterplan
- 6 **Pendampingan penyusunan masterplan 10 distrik**
- 7 **Pendampingan pelaksanaan komponen distrik** sebagai pusat pelayanan dasar dan komponen distrik sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan
- 8 **Membangun komitmen pemerintah distrik**

DAMPAK KEGIATAN



Paradigma berpikir aparatur yang semakin baik dalam memetakan situasi dan menyepakati tahapan mulai dari koordinasi dengan kampung, pengelolaan data, hingga perencanaan pembangunan tersinergi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama pembangunan distrik.



Distrik memiliki pengalaman mempraktikkan secara nyata koordinasi pembangunan di wilayahnya melalui praktik *monitoring* dan evaluasi kegiatan-kegiatan sinergi kampung dan unit layanan, yang dapat dilakukan kembali secara periodik.



Lahirnya pusat pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kakao dengan menggunakan basis data dari SIO Papua, mengidentifikasi kepala keluarga pemilik kebun kakao serta potensi distrik lainnya untuk budidaya dan distribusi hasil kebun kakao.



“Distrik Membangun-Membangun Distrik merupakan pembaharuan dari pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral menjadi pembangunan berbasis kewilayahan yang menempatkan distrik sebagai pusat pelayanan dasar, pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, dan pusat pemerintahan ekonomi. Hal ini, juga sekaligus membangun model pembangunan secara kontekstual Papua sesuai mandat Otsus Papua,” **Matius Awaitouw, S.E., M.Si.,-Bupati Jayapura, Papua.**

Tertarik menginisiasi **Distrik Membangun - Membangun Distrik** di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Elphina Situmorang

Asisten I Bidang Pemerintahan, SETDA Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

☎ 0822 1394 2666

Parson Horota

Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

☎ 0821-9832-1763

Dukungan Penguatan untuk Pencatatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH). Mendekatkan Layanan Adminduk ke Tingkat Kampung Melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Provinsi Papua dan Papua Barat

Sistem PASH mencatat dan mengelola data kependudukan yang inklusif secara efektif dan akuntabel untuk mendorong perbaikan akses layanan dasar, perlindungan sosial, dan pengembangan ekonomi yang tepat sasaran sehingga berkontribusi pada penurunan kemiskinan.



Pencatatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) adalah sebuah model yang diinisiasi oleh KOMPAK dalam kerja sama lintas sektor untuk percepatan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Kampung (LABKK). Model ini menjawab tantangan yang muncul dari adanya kesenjangan antara target nasional terhadap cakupan dokumen kependudukan dan capaian di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu PASH juga menjadi model inisiatif untuk mendorong pemerintah daerah sebagai penyedia layanan agar aktif dan di saat bersamaan mendampingi masyarakat untuk memahami haknya serta tata cara mengakses layanan adminduk.

PASH mendekatkan layanan adminduk dan memperbanyak titik tangkap layanan di kampung sehingga dapat menghilangkan hambatan jarak, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan anggaran untuk melakukan penjangkauan. Beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat juga telah melembagakan layanan adminduk terintegrasi lintas sektor untuk memperbanyak titik tangkap layanan. Dengan model ini, sektor kesehatan dan pendidikan juga dapat memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan.

Selain itu, PASH memperkuat mekanisme pendataan penduduk berbasis kampung melalui SIO Papua dan SAIK+. Pendataan ini memberikan umpan balik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten untuk mengidentifikasi penduduk yang belum tercatat dalam data kependudukan yang ada pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta menindaklanjuti dengan memberikan layanan penjangkauan. Akhirnya skema ini akan membantu Disdukcapil untuk selalu memperbaharui data kependudukan serta menjaga akurasi data dengan adanya data pembanding.

KOMPONEN KEGIATAN



Regulasi

perbup kerja sama lintas sektor, perjanjian kerja sama Disdukcapil dengan Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan dan pemerintah / distrik/kampung



Anggaran

pelaksanaan kegiatan yang mendukung model kerja sama lintas sektor



Data kependudukan

melalui SIO Papua dan SAIK+



Kader dan fasilitator



Pendampingan implementasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

- 1 Melakukan analisis situasi cakupan kepemilikan adminduk di Papua dan Papua Barat
- 2 Mensosialisasikan program dan hasil analisis situasi kepemilikan dokumen adminduk
- 3 Menyepakati model percepatan kepemilikan dokumen adminduk di masing-masing kabupaten
- 4 Menyusun regulasi daerah, perbup kerja sama lintas sektor, MoU/PKS sesuai kebutuhan kabupaten
- 5 Advokasi anggaran mendukung PASH
- 6 Penyusunan modul pelatihan
- 7 Pelatihan bagi pelatih PASH
- 8 Pelatihan bagi kader PASH
- 9 Observasi dan pendampingan bagi kader PASH



DAMPAK KEGIATAN



Disdukcapil Kabupaten Nabire menginisiasi pelayanan jemput bola bekerja sama dengan kampung, Dinas Pendidikan dan lembaga keagamaan untuk menerbitkan akta perkawinan, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan perekaman KTP. Hasilnya:

- Sebanyak **11.000 anak di Distrik Moora dan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire telah terdata dalam program penerbitan KIA.**
- Sebanyak **50 warga Kampung Kama telah memiliki KTP.**
- Sebanyak **50 keluarga di Kampung Kama telah memiliki KK.**
- Sebanyak **120 KK dan 150 KTP telah diterbitkan untuk warga Kampung Hariti dan Mambor.**
- Sebanyak **50 pasangan di Kampung Hariti dan Mambor telah memiliki akta perkawinan.**



Di Kabupaten Jayapura, layanan adminduk menjadi bagian program DMMD. Hasilnya:

- Di Distrik Nimboran sebanyak **96 orang sudah memiliki KTP, serta sebanyak 117 akta kelahiran, 248 KK, dan 7 akta kematian telah diterbitkan.**
- Di Distrik Sentani Kota, sebanyak **2.531 orang telah memiliki KTP, sementara sebanyak 694 KK, 266 akta kelahiran, dan 23 akta kematian telah diterbitkan.**



Disdukcapil kabupaten memiliki data aktual warga masyarakat yang belum mempunyai dokumen adminduk.



Kampung memiliki kepedulian terhadap warga masyarakat yang belum mempunyai adminduk.



Alokasi pengurusan dokumen dari dana kampung.



Kader kampung mampu secara mandiri fasilitasi warga masyarakat dalam mengurus dokumen adminduk.

“Pelayanan Adminduk tidak hanya untuk warga di Nimboran saja namun juga warga dari enam distrik lainnya. Masyarakat sama sekali tidak dipersulit saat mengurus dokumen kependudukan di kantor distrik. Khusus bagi penyandang disabilitas, pelayanan dokumen kependudukan dilaksanakan secara langsung di rumah warga tersebut oleh petugas distrik,” Heral J. Berhitsu - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Papua.

Tertarik menginisiasi **Pencatatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH)** di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Eli Sembor

Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat

☎ 0813 4458 4949

Sarah Nuraida

Sekretaris Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

☎ 0812 4807 1209

Pemberdayaan Masyarakat Kampung & Kader Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat

Pemberdayaan masyarakat dan kader kampung mendorong terfasilitasinya aspirasi warga, sehingga musyawarah kampung menjadi lebih responsif serta berbasis data dan informasi masyarakat kampung.



Pemberdayaan masyarakat kampung berupaya menyelesaikan masalah prioritas yang ada di kampung dengan cara menetapkan strategi, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat kampung dan melibatkan pihak lain untuk membantu masyarakat. Masalah prioritas kampung antara lain berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk, angka putus sekolah, buta huruf, bantuan usaha dan masalah kepemilikan dokumen adminduk. Program ini melibatkan peran aktif masyarakat termasuk kelompok rentan dan berbagai pemangku kepentingan.

Kader Kampung adalah pemuda-pemudi asal kampung yang dipilih dan diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Kampung. Mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah kampung dan pihak luar. Selain itu, kader kampung juga mengumpulkan dan mengelola administrasi dan informasi kampung melalui aplikasi SIO Papua atau SAIK+ yang memuat data kependudukan yang terpilah (OAP dan non-OAP), potensi kampung, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya masyarakat, dan surat menyurat. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh kader kampung dan dimasukkan ke dalam SIO Papua atau SAIK+ akan dianalisis, untuk ditampilkan dalam musyawarah kampung sebagai bahan diskusi bersama warga.

Sejak tahun 2017, Program KOMPAK-LANDASAN melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan dan evaluasi dari proses pendampingan baik itu untuk kader kampung, aparatur kampung serta fasilitator pada tingkat distrik dan kabupaten; menyusun panduan atau modul yang kontekstual Papua untuk peningkatan kapasitas; dan memfasilitasi terbentuknya regulasi baik itu SK kepala kampung untuk kader dan juga regulasi untuk penganggaran kader dalam APB Kampung.

KOMPONEN KEGIATAN



Peraturan Bupati Asmat No. 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang memuat peran SIO Papua, penganggaran untuk kader kampung serta Program Sinergi Perencanaan Kampung



Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua di Kabupaten Asmat, Nabire dan Jayapura



Anggaran - Dana Kampung (untuk kegiatan kader kampung), dan APBD Provinsi



Sumber daya manusia



Pelatihan perencanaan dan penganggaran kampung (penyusunan dokumen RPJM Kampung, RKP Kampung, dan APB Kampung) pelatihan terhadap tupoksi aparatur kampung, Bamuskam, dan kader kampung.



Simulasi program

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

- 1 **Melakukan identifikasi berbagai masalah** yang dihadapi oleh masyarakat sebagai bagian dari penyusunan RPJM Kampung 6 tahunan
- 2 **Menetapkan peringkat masalah** serta merumuskan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi yang dimiliki
- 3 **Menyusun matriks rencana kerja** 6 tahunan
- 4 **Menetapkan program pembangunan prioritas tahunan melalui RKP Kampung dan ABP Kampung** sesuai dengan musyawarah kampung
- 5 **Mengimplementasikan pembangunan sesuai prioritas kampung** dilakukan dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung



DAMPAK KEGIATAN



Pelayanan lebih tepat sasaran dan semua masyarakat dapat terlayani.



Sebanyak **211 kampung (120 di Papua dan 91 di Papua Barat)** dampingan Program **KOMPAK-LANDASAN** telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kader kampung.



Program ini telah **direplikasi di 65 kampung dan 5 kelurahan** di luar wilayah dampingan Program **KOMPAK-LANDASAN**.



Sebanyak **1.231 Kader Kampung (893 laki-laki dan 338 perempuan)** telah mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas melalui Program **KOMPAK-LANDASAN**.



Masyarakat lebih mudah mengurus dokumen adminduk.



Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat lebih tepat sasaran serta memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak yatim piatu, perempuan kepala keluarga, dan duda.

"Kami aparaturnya kampung dalam menyusun RPKK tiap tahun, tinggal lihat data yang ada dalam SIO Papua, baik itu untuk anak sekolah, bantuan beasiswa, bantuan perumahan, untuk pengurusan BLT, siapa yang tidak memiliki KK, anak tidak memiliki akta kelahiran dan KIA. Khusus orang asli Papua. Semua itu, sudah ada dalam SIO Papua," **Lodwik Daundi - Sekretaris Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua.**

"Walaupun yang kami hadapi itu hujan, tetapi kami pergi dengan sukacita, kami pergi dengan senang hati hanya untuk kemajuan atau kebaikan untuk kampung kita," **Sonya Ainusi - Kader dan Sekretaris Desa Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.**

"Anak kami, kader kampung, Manison Kiwo, telah menginput data 84 keluarga di kampung ini. Sekarang 84 keluarga ini sudah memiliki KTP dan akta kelahiran serta bisa menikmati berbagai program bantuan dari pemerintah," **Tim Kogoya - Warga Kampung Wunabunggu, Distrik Malagai, Kabupaten Lanny Jaya, Papua.**

Tertarik menginisiasi **Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kader Kampung** di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Parson Horota

Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
☎ **0821-9832-1763**

I Gede Wisnu Wardana

Kepala Bidang Pengembangan Kampung DPMK, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
☎ **0852-4404-4094**

Pemberdayaan Masyarakat Kampung & Kader Kampung untuk Program Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Masyarakat dan kader kampung yang berdaya dapat secara mandiri mengatur diri dan menyelenggarakan berbagai kegiatan guna menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang selama ini menjadi masalah serius di Tanah Papua seperti Malaria, HIV-AIDS, *stunting* hingga COVID-19.



Pemberdayaan masyarakat kampung dan kader kampung di bidang kesehatan merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dengan dukungan Program KOMPAK untuk menunjang kampung agar dapat secara mandiri menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat guna menanggulangi Malaria, HIV-AIDS, gizi buruk (termasuk *stunting*) dan/atau COVID-19.

Kegiatan ini juga menginisiasi lahirnya program-program kesehatan yang berbasis masyarakat, mengatasi tumpang tindih antar program yang berjalan di tingkat kampung dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah kampung dan distrik yang masih belum cukup optimal untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di tingkat kampung.

Sejak Oktober 2017, Program KOMPAK bersama pihak-pihak terkait di tingkat provinsi hingga kampung mengadakan pelatihan dan pendampingan kader kesehatan dan pembentukan Tim Malaria Kampung, Tim Kesehatan Kampung Percontohan, dan Tim Kesehatan Kampung sebagai komponen PROSPEK OTSUS Papua Barat. Selain itu program ini juga telah menyusun bahan kegiatan seperti rancangan program, materi pelatihan, buku-buku bacaan dan perlengkapan pelatihan, memfasilitasi pelatihan kader dan fasilitator, serta mendampingi fasilitator.

KOMPONEN KEGIATAN



- **Peraturan Bupati No.76 Tahun 2018** tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Fakfak
- **SK Kepala Kampung Kiat dan Werba** (Distrik Fakfak Barat) serta Sekru dan Sekban (Distrik Pariwari)



Dana Kampung



Pembentukan dan pelatihan Tim Kesehatan Kampung



Pembentukan dan pelatihan fasilitator



Pendampingan



Sosialisasi program



Monitoring dan evaluasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

- 1 Menyusun petunjuk teknis dan buku-buku panduan Program Malaria Terintegrasi
- 2 Menyelenggarakan lokakarya pemangku kepentingan dari empat kabupaten lokasi uji coba (Jayapura, Asmat, Fakfak dan Manokwari Selatan)
- 3 Menyelenggarakan pertemuan di tingkat kampung dan distrik
- 4 Membentuk tim fasilitator di masing-masing kabupaten
- 5 Menyelenggarakan pelatihan fasilitator Tim Malaria Kampung
- 6 Melakukan pendampingan Tim Malaria Kampung
- 7 Pelaksanaan program oleh puskesmas dan Tim KOMPAK-LANDASAN
- 8 Memfasilitasi penyusunan perbup penanggulangan Malaria
- 9 Melakukan pendampingan oleh tim fasilitator kabupaten hingga penetapan perbup



DAMPAK KEGIATAN



Pada tahun 2019 telah tersedia penganggaran insentif kader pada Dana Kampung di empat kampung di Kabupaten Fakfak dan tujuh kampung di Kabupaten Asmat.



Malaria menjadi isu yang dibahas dalam perencanaan kampung.



Tersedianya Fasilitator Tim Malaria Kampung di Papua dan Papua Barat yang beranggotakan 38 orang.



Tersedianya Fasilitator Tim Kesehatan Kampung Percontohan di Distrik Akat, Kabupaten Asmat.



Tersedianya Fasilitator Tim Kesehatan Kampung sebagai komponen PROSPPEK OTSUS Papua Barat.



Komponen Kesehatan PROSPPEK OTSUS telah diinisiasi dengan pelatihan Tim Kesehatan Kampung di empat kabupaten.



Inisiatif KOMPAK (pencegahan malaria berbasis masyarakat dan media komunikasi malaria) menjadi salah satu referensi dalam penyusunan strategi nasional penanggulangan Malaria 2020 – 2024 dan proposal Global Fund 2021 – 2024.

“Begitu kami jalan, tim Malaria ini, Malaria sudah tidak kami dapat di Kampung Werba ini. Memang dulunya ada, tapi begitu ada timnya Malaria, kami tidak pernah disentuh malaria,” **Permenas Hindom - Ketua Tim Malaria Kampung Werba, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.**

“Kalau derajat kesehatan masyarakat kita perbaiki, berarti prioritasnya adalah bagaimana pendekatan sistemik kita benahi. Saya yakin sekali, kasus Malaria di Fakfak sudah mengalami perubahan cukup drastis,” **Dr. Mohammad Uswanas, M.Si., - Bupati Fakfak Periode 2010 - 2021, Papua Barat.**

Tertarik menginisiasi **Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kader Kampung** untuk Program Kesehatan di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

dr. I Made Linggawijaya
Health Specialist
Community Strengthening/KOMPAK
✉ linggawijaya@yahoo.com

Pastor Vesto Maing
Paroki Ayam, Keuskupan Agats,
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
☎ **0821-9959-3495**

